



KEAMANAN INSANI

(Human Security)

Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia



Abubakar Eby Hara
Agus Trihartono
Suyani Indriastuti

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abubakar Eby Hara, Agus Trihartono, Suyani Indriastuti

Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia/
Abubakar Eby Hara, Agus Trihartono, Suyani Indriastuti; editor: Rahma Frida—
Yogyakarta: Pandiva Buku, 2023.

xx + 238 hal; 23 cm

ISBN: 978-623-8243-00-6

1. Judul

I. Rahma Frida

KEAMANAN INSANI (HUMAN SECURITY)

Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia

Penulis:

Abubakar Eby Hara

Agus Trihartono

Suyani Indriastuti

Editor:

Rahma Frida

Perancang Isi:

Agung Julianto Damanik

Desain Kover:

Infinite Project

Edisi Pertama: April 2023

Pandiva Buku

Anggota IKAPI

MidClass Outlet

Gang Puntodewo No. 164 D, Kanoman, Karangjambe, Banguntapan
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat, petunjuk, serta karunia yang diberikan-Nya, kami mampu menyelesaikan buku yang berjudul *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*. Buku ini berusaha untuk menjelaskan perkembangan studi keamanan insani dari berbagai perspektif di dunia.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang menjadi penyokong dalam perwujudan buku ini. Pertama, kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), khususnya hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Jember (Nomor Kontrak: 4522/UN25.3.1/LT/2021). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jember, LP2M Universitas Jember, dan Centre for Human Security Studies (CHSS), serta para pihak yang banyak membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Tak lupa, rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini.

Secara khusus kami berterima kasih kepada tim riset asisten dari CHSS, antara lain, Pelangi Sinatrya Anadan Sasmito, Nur Zahrun Al Jannah, Annisa Rizkyta, Gilang Ariantama, Dhavina Ayunda Putri, Mochammad Arya Susila, Rizantha Villano Setyo Putra, Sirly Tsalasa Dinislami, Rifka Imaniah Alif Firdausya, Salsabila Khairunnisa,

Fathoni Agung Nugraha, Elvina Akyas Laksono Putri, dan Refika Febrianti.

Terakhir, seandainya ada bagian yang baik dari buku ini, tentu saja karena bantuan dan dukungan dari para narasumber dan semua yang kami sebutkan di atas. Namun, kalau ada bagian yang kurang dan tidak lengkap, itu semua sepenuhnya dan semata-mata karena keterbatasan kami.

Hormat kami,

Tim Penulis



DAFTAR ISI

Prakata — v

Daftar Isi — vii

Daftar Singkatan — xi

PENDAHULUAN — xviii

BAB I GENESIS KONSEP KEAMANAN INSANI — 1

Pendahuluan — 1

1.1 Konteks dan Sejarah Kemunculan Konsep
Human Security — 1

1.2 Dari Keamanan Tradisional ke non-Tradisional — 7

1.3 Asumsi Dasar Keamanan Insani (*Human Security*):
Berbagai Definisi — 9

1.3.1 Universal — 9

1.3.2 Berpusat pada Manusia (*People-Centered*) — 10

1.3.3 Interdependen — 12

1.3.4 Multidimensional — 12

1.4 Upaya Mengatasi *Human Security* — 13

1.5 Kritik terhadap Konsep *Human Security* — 14

1.6 Konsepsi Mutakhir *Human Security* — 18

Kesimpulan — 20

BAB 2 PERSPEKTIF UNDP — 23

Pendahuluan — 23

2.1 Latar Belakang *Human Security* UNDP — 24

2.2	Perkembangan <i>Human Security</i> UNDP	— 27
2.2.1	Keamanan Ekonomi (<i>Economic Security</i>)	— 30
2.2.2	Keamanan Lingkungan (<i>Environmental Security</i>)	— 31
2.2.3	Keamanan Pangan (<i>Food Security</i>)	— 33
2.2.4	Keamanan Personal (<i>Personal Security</i>)	— 34
2.2.5	Keamanan Komunitas (<i>Community Security</i>)	— 36
2.2.6	Keamanan Politik (<i>Political Security</i>)	— 36
2.2.7	Keamanan Kesehatan (<i>Health Security</i>)	— 37
2.3	Implementasi <i>Human Security</i> UNDP	— 40
2.4	Kritik dan Tantangan terhadap <i>Human Security</i> UNDP	— 46
	Kesimpulan	— 49
BAB 3 PERSPEKTIF JEPANG — 53		
	Pendahuluan	— 53
3.1	Latar Belakang Konsep <i>Human Security</i> Versi Jepang	— 54
3.2	Perkembangan Kemanan Insani Versi Jepang	— 57
3.3	Implementasi <i>Human Security</i> Jepang	— 58
3.3.1	Domestik	— 59
3.3.2	<i>Foreign Policy</i>	— 83
3.4	Kritik dan Tantangan terhadap Kemanan Insani Versi Jepang	— 88
BAB 4 PERSPEKTIF KANADA — 91		
	Pendahuluan	— 91
4.1	Latar Belakang Konsep <i>Human Security</i> Versi Kanada	— 92
4.2	Perkembangan <i>Human Security</i> di Kanada	— 96
4.3	Kanada dan <i>Responsibility to Protect</i>	— 99
4.4	Implementasi <i>Human Security</i> Kanada	— 102
4.5	Kritik dan Tantangan terhadap <i>Human Security</i> Kanada	— 113
	Kesimpulan	— 116

BAB 5 PERSPEKTIF UNI EROPA — 119

Pendahuluan — 119

5.1 Latar Belakang Konsep *Human Security*

Menurut Uni Eropa — 120

5.1.1 Kumpulan Konsep Keamanan Insani Menurut
Uni Eropa — 121

5.1.2 Alasan Mengapa Keamanan Insani Menjadi Perhatian
Uni Eropa — 123

5.2 Perkembangan Konsep dan Prinsip *Human Security*
Versi Uni Eropa — 128

5.2.1 Perkembangan *Human Security* di tingkat
negara-negara UE — 134

5.2.2 Prinsip Pendekatan Keamanan Manusia UE — 137

5.2.3 Pendekatan *Bottom-Up* — 138

5.2.4 Mengutamakan Hak Asasi Manusia — 139

5.2.5 Penggunaan Otoritas yang Jelas — 141

5.2.6 Multilateralisme — 142

5.2.7 Fokus Regional — 143

5.2.8 Penggunaan Instrumen Hukum — 144

5.2.9 Penggunaan Kekuatan yang Tepat — 145

5.3 Implementasi Konsep *Human Security* Uni Eropa — 147

5.3.1 *Human Trafficking* — 149

5.3.2 Penegakan Kemanusiaan — 149

5.4 Tantangan dan Kritik Uni Eropa dalam Melaksanakan Konsep
Human Security — 151

5.4.1 Kurangnya Perspektif Gender — 152

5.4.2 Intervensionisme yang Meragukan — 154

5.4.3 Konsep *Human Security* yang Sempit vs Luas — 155

5.4.4 Konsep *Human Security* yang Sempit vs Luas — 155

Kesimpulan — 156

BAB 6 PERSPEKTIF INDONESIA — 159

Pendahuluan — 159

6.1 Metode Penelitian — 163

6.2 Pengembangan dan Penyebaran *Human Security* sebagai
Agenda Global — 168

6.3 Tinjauan *Pustaka Human Security* di Indonesia — 171

6.4 Menuju Reinterpretasi Konsep Keamanan Manusia — 176

6.5 Dilema Negara, Peran AANN dan Inisiatif Lokal — 180

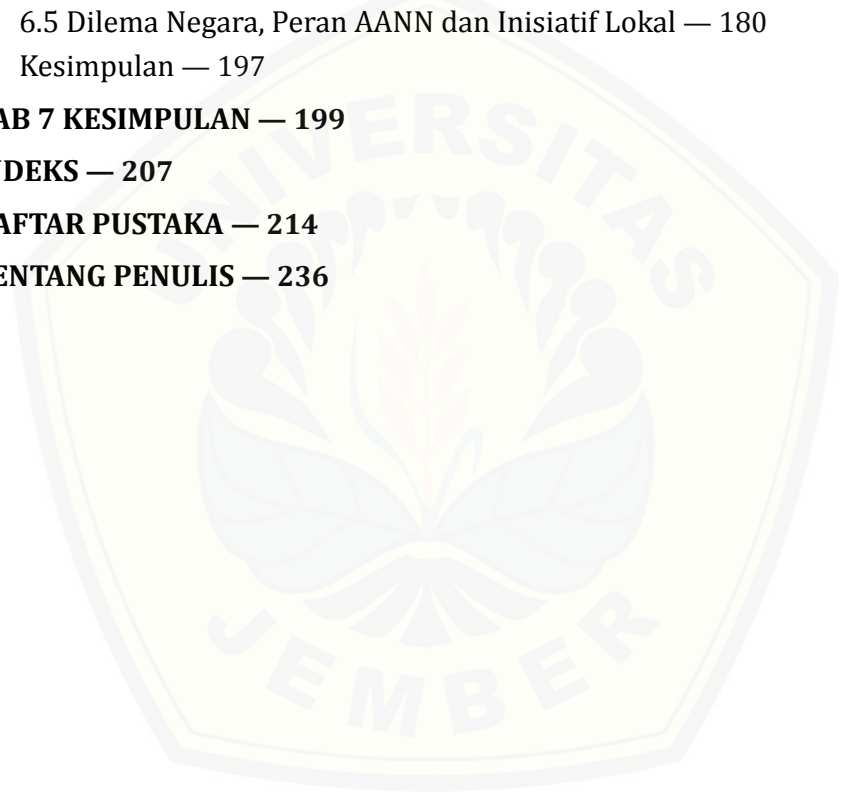
Kesimpulan — 197

BAB 7 KESIMPULAN — 199

INDEKS — 207

DAFTAR PUSTAKA — 214

TENTANG PENULIS — 236



DAFTAR SINGKATAN

AANN	Aktor Agama Non-negara
ABHS	Advisory Board on Human Security (Dewan Penasihat Keamanan Manusia)
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
AU	African Union (Uni Afrika)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	Badan Pembangunan Desa
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
CFSP	Common Foreign and Security Policy (Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama)
CHS	Commission on Human Security (Komisi Keamanan Manusia)
CSR	Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial perusahaan)
DEPPOLKAM	Departemen Politik dan Keamanan
ESDP	European Security and Defence Policy (Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa)
ESS	European Security Strategy (Strategi Keamanan Eropa)
EU	European Union (Uni Eropa)

EUGS	EU Global Strategy (Strategi Global UE)
FAO	the Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa)
FGD	Forum Group Discussion (Forum Diskusi Kelompok)
FHS	Friend of Human Security (Sahabat Keamanan Manusia)
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
GA	General Assembly (Majelis Umum)
HAM	Hak Asasi Manusia
HDR	Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia)
HERP	Headquarters for Earthquake Research Promotion (Markas Promosi Riset Gempa Bumi)
HI	Hubungan Internasional
HIV/AIDS	Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrom (Virus Immunodefisiensi Manusia)
HS	Human Security (Keamanan Insani)
HSFP	Highly Skilled Foreign Professional (Profesional Asing yang Sangat Terampil)
HSN	Human Security Network (Jaringan Keamanan Manusia)
HSU	Human Security Unit (Satuan Keamanan Manusia)
ICC	International Criminal Court (Pengadilan Pidana Internasional)
IKMI	Indeks Keamanan Manusia Indonesia

IMF	International Monetary Funds (Dana Moneter Internasional)
IO	International Organization (Organisasi Internasional)
IOM	International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi)
IR	International Relations (Hubungan Internasional)
JAMSTEC	Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (Badan Sains dan Teknologi Kelautan-Bumi Jepang)
KDPDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KEMENKOPOLUKHAM	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia
KESBANGPOL	Kesatuan Bangsa dan Politik
KKD	Kader Kesehatan Desa
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LA-NU	Lajnah Auqaf
LAKPESDAM-NU	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
LAS	League of Arab States (Liga Negara Arab)
LAZIS-NU	Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
LD-NU	Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
LEMLIT	Lembaga Penelitian
LP-NU	Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama

LPK-NU	Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama
LPP-NU	Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)
NATO	North Atlantic Treaty Organization (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara)
NERHQ	Nuclear Emergency Response Headquarters (Markas Besar Tanggap Darurat Nuklir)
NGO	Non-Governmental Organization (Organisasi non pemerintah)
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRA	Nuclear Regulation Authority (Otoritas Regulasi Nuklir)
NU	Nahdlatul Ulama
OAS	Organization of American States (Organisasi Negara-negara Amerika)
OCHA	Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan)
ODA	Official Development Assistance (Bantuan Pembangunan Resmi)
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
OI	Organisasi Internasional
ORA	Organisasi Rakyat
ORMAS	Organisasi Kemasyarakatan

OSCE	Organization for Security and Co-operation in Europe (Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa)
PAHO	The Pan American Health Organization (Organisasi Kesehatan Pan Amerika)
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PEMDA	Pemerintah Daerah
PKO	Penolong Kesengsaraan Oemoem
POLHUKKAM	Politik Hukum dan Keamanan
PPBM	Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah
R2P	Responsibility to Protect (Tanggung Jawab Melindungi)
RMI-NU	Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama
SDGs	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDI	Serikat Dagang Islam
SSW	Specified Skilled Worker (Pekerja Terampil Tertentu)
TFEU	Treaty on the Functioning of the European Union (Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa)
THB	Trafficking in Human Beings (Perdagangan Manusia)
TKW	Tenaga Kerja Wanita
UE	Uni Eropa
UK	United Kingdom (Britania Raya)
UNDP	United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNFPA	United Nation Population Fund (Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi)
UNICEF	United Nations Children's Fund (Dana Anak-anak PBB)
UNLIREC	United Nations Regional Center for Peace, Disarmament, and Development in Latin America and the Caribbean (Pusat Regional PBB untuk Perdamaian, Perlucutan Senjata, dan Pembangunan di Amerika Latin dan Karibia)
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan)
UNTFHS	United Nations Trust Fund for Human Security (Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia)
WFP	World Food Programme (Program Pangan Dunia PBB)
WHO	World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)
WMD	Weapons of Mass Destruction (Senjata Pemusnah Massal)
WTO	World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)

PENDAHULUAN

Buku ini bertujuan untuk menggali perspektif *Human Security* (Keamanan Insani) yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia. Masalah ini merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Masyarakat Indonesia punya pengalaman, kebutuhan, dan pandangan sendiri tentang *human security* (HS) yang dibentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Sejauh ini, HS lebih dipahami dari perspektif luar negeri, bersamaan dengan masuknya berbagai bantuan, misalnya untuk mengatasi kemiskinan serta memperbaiki fasilitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan demikian bukannya tidak penting, tetapi sebagian sering kali tidak tepat sasaran, menimbulkan masalah baru yang dilematis, dan tidak berkesinambungan.

Indonesia memiliki latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara pelopor pendekatan HS, seperti Jepang, Kanada, dan Norwegia, yang merupakan negara maju dengan sumber dana pembangunan yang besar. Negara-negara ini dan United Nations Development Programme (UNDP) mempunyai definisi sendiri tentang apa yang dimaksud HS dan melakukan kegiatan berdasarkan definisi mereka masing-masing (1). UNDP (1994:23) mendefinisikan HS sebagai '*safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression*' as well as

BAB I

GENESIS KONSEP KEAMANAN INSANI

Pendahuluan

Konsep keamanan terus berkembang seiring dengan semakin berkembangnya jenis ancaman dan persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap ancaman tersebut. Konsep keamanan mengalami redefinisi mulai dari keamanan tradisional hingga keamanan non-tradisional yang kemudian diikuti dengan konsep *Human Security* atau HS.

Bab ini membahas tentang genesis konsep HS. Urutan subbab adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan membahas konteks kelahiran konsep HS. Kedua, kami membahas perkembangan definisi HS dari keamanan tradisional ke non-tradisional. Ketiga, kami membahas asumsi-asumsi dasar HS. Keempat, kami mendiskusikan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperluas definisi keamanan yaitu melalui sekuritisasi. Kelima, kami mencoba melihat kritik terhadap konsepsi HS. Terakhir, keenam, kami mengkaji arah konsepsi mutakhir HS yang lebih sensitif pada pengalaman lokal.

BAB 2

PERSPEKTIF UNDP

Pendahuluan

Bab ini akan mengulas bagaimana United Nations Development Program (UNDP) merumuskan konsep *Human Security* (HS). Perspektif *human security* menurut UNDP terdapat dalam Human Development Report (HDR) tahun 1994. UNDP melihat bahwa adanya dinamika keamanan yang berkembang, sehingga dirasa perlu merumuskan garis-garis nilai keamanan. Perspektif *human security* yang dirumuskan oleh UNDP memiliki beberapa komponen. Dalam komponen tersebut, terdapat nilai-nilai yang diusung dalam konsep *human security*. Nilai-nilai yang ditawarkan yaitu bebas dari rasa takut atau *freedom from fear*, bebas dari kekurangan kebutuhan atau *freedom from want*, dan hidup bebas bermartabat atau *freedom to live in dignity*.

Secara garis besar, bab keempat ini terbagi menjadi empat bagian yang akan mengulas konsep *human security* menurut UNDP. Pada bagian pertama, akan membahas latar belakang perumusan konsep *human security* sebagai sebuah perspektif baru. Di bagian kedua, berisi perkembangan *human security* dari tahun ke tahun, nilai-nilai *human security* menurut UNDP, dan ancaman-

BAB 3

PERSPEKTIF JEPANG

Pendahuluan

Pada bab ini, kita akan membahas *human security* dalam perspektif Jepang. Konsep HS Jepang sering disempitkan dalam kerangka “*freedom from want*” yang menyambut Human Development Report of the United Nations Development Programme (UNDP) 1994. Atas landasan ini, Jepang bekerja sama erat dengan PBB, dan di tahun 1999 mendukung pembentukan The United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) yang kemudian bekerja sama dengan UNDP, UNESCO, UNHCR, and WHO. Dalam perkembangannya, Jepang juga bekerja sama dengan Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*) yang memandang keamanan manusia sebagai konsep sentral. Secara umum, HS Jepang sejalan dengan dukungan PBB terhadap konsep ini, yakni memastikan keamanan manusia dalam arti luas.

Berbeda dengan negara-negara lain, seperti Kanada dan Norwegia, yang telah mengembangkan agenda aktif topik-topik terpisah yang mengisi cabang keprihatinan “kebebasan dari rasa takut” dan terletak dalam kebijakan luar negeri mereka sendiri, kebijakan luar negeri Jepang dan pilar keamanan Bank Dunia

BAB 4

PERSPEKTIF KANADA

Pendahuluan

Kanada telah menjadikan *human security* (keamanan insani) sebagai paradigma kebijakan luar negerinya sekaligus mengambil peran penting dalam operasionalisasinya di panggung global (Alkire, 2003: 20). Departemen Luar Negeri Kanada sendiri mendefinisikan keamanan insani sebagai “*freedom from pervasive threats to people's rights, safety, and lives*”. Keamanan insani digunakan untuk melindungi orang-orang dari ancaman kekerasan terhadap keselamatan, hak-hak, dan penghidupan mereka (DFAIT, 1999).

Motivasi utama Kanada dalam kebijakan luar negerinya adalah untuk membantu negara-negara yang gagal dalam membangun keamanan insaninya. Oleh karena itu, keamanan insani menjadi kata kunci politik luar negeri Kanada. Gunanya untuk menampung berbagai aspek yang sebelumnya dianggap sebagai domain terpisah dari kebijakan luar negeri, seperti kontrol senjata, hak asasi manusia, urusan kemanusiaan, operasi perdamaian, keadilan internasional, dan pemerintahan yang demokratis. Isu-isu ini melibatkan ancaman terhadap keamanan masyarakat yang tidak

BAB 5

PERSPEKTIF UNI EUROPA

Pendahuluan

Bab ini akan meninjau perspektif European Union (EU) atau Uni Eropa (UE) dalam menanggapi isu *human security* atau keamanan insani. Di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Uni Eropa memulai perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan berdasarkan berbagai aspek latar belakang Uni Eropa, seperti ekonomi, politik, dan sosial budayanya. Berangkat dari adanya peristiwa terorisme yang sering terjadi pada tahun 2000-an dan kurangnya kekuatan militer di Uni Eropa, menimbulkan upaya lebih keras untuk mengatasi kebutuhan keamanan bagi warganya.

Dalam menjelaskan keamanan insani versi Uni Eropa, bab ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama akan mengulas latar belakang konsep pandangan *human security* menurut Uni Eropa. Kedua, menguraikan perkembangan konsep *human security* versi Uni Eropa. Ketiga, akan dijelaskan implementasi konsep *human security* Uni Eropa. Kemudian, pada bagian selanjutnya memaparkan tantangan dan juga kritik yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam melaksanakan konsep *human security*. Lalu, di akhir ada kesimpulan.

BAB 6

PERSPEKTIF INDONESIA

Pendahuluan

Human security (HS) telah menjadi norma penting dalam hubungan internasional sejalan dengan norma global lainnya, seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Corporate Social Responsibility (CSR), demokrasi, dan hak asasi manusia (Muto, 2020). Meski mendapat berbagai kritik, terutama mengenai definisinya yang luas, konsep HS telah menyebar ke seluruh dunia dan masuk dalam kebijakan di berbagai negara. Beberapa negara industri yang tergabung dalam United Nations Development Programme (UNDP), seperti Jepang, Kanada, dan Norwegia, merasa perlu untuk membantu *human security* (HS) di negara-negara yang mengalami penurunan pada aspek keamanan manusia.

Daya tariknya yang kuat tidak terlepas dari perubahan besar dalam memandang keamanan dari keamanan negara menjadi keamanan manusia setelah berakhirnya Perang Dingin. Perhatian dunia pada awalnya terfokus pada keamanan negara akibat konflik Timur-Barat, namun telah bergeser ke isu-isu yang menyangkut keamanan manusia. HS menjadikan manusia sebagai fokus ancaman kompleks yang didefinisikan UNDP sebagai kebebasan dari rasa

Kritik terhadap perkembangan konsep HS ini tidak berarti bahwa konsep tersebut kehilangan relevansinya. Bagaimanapun, sebuah konsep lahir dalam konteks dan harus menyadari keterbatasannya. Konsep HS awalnya lahir setelah Perang Dingin di mana disadari secara luas bahwa masalah keamanan tidak hanya terbatas pada keamanan negara, tetapi juga berbagai masalah kemanusiaan yang dihadapi manusia sejak lama. Selama Perang Dingin, isu ini secara akademis disingkirkan sebagai sesuatu yang disebut politik rendah dan tidak penting dibandingkan dengan isu Perang Dingin antara blok Amerika Serikat dan Uni Soviet yang disebut *high politics*.

Pengabaian ini lebih banyak berhubungan dengan konteks di negara-negara industri Barat yang beranggapan bahwa HS di negara mereka sudah diatasi dan dianggap bisa dikelola, sedangkan di luar negeri, dunia penuh dengan anarki karena tidak ada pemerintahan dunia (Walker, 1992). Diasumsikan bahwa di dalam negeri, ada pemerintahan dan ketertiban, sedangkan di luar negeri tidak ada pemerintahan dan anarki. Barangkali anggapan ini relatif benar dalam konteks negara industri maju barat, namun tidak untuk negara berkembang yang dihadapkan pada berbagai konflik dan anarki di negaranya. Pengabaian ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara-negara Dunia Ketiga yang berjuang mengatasi berbagai masalah dalam negeri. Mereka menghadapi ketidakmampuan negara untuk mengontrol keamanan dan menciptakan rasa aman bagi rakyatnya.

Mengingat HS merupakan masalah yang sudah lama ada dan dihadapi oleh berbagai negara, terutama di negara berkembang, maka jika konsep HS ingin memiliki kekuatan untuk memahami berbagai fenomena, konsep ini perlu diinterpretasi ulang, demi mencakup rentang sejarah yang lebih lama dan lebih peka terhadap

BAB 7

KESIMPULAN

Di bagian ini, para penulis memaparkan refleksi dan konklusi dari bab-bab yang telah dimuat dalam buku *Keamanan Insani (Human security): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*. Dalam konteks kajian Hubungan Internasional yang terus berkembang, akan semakin banyak pula diskursus dan pemahaman baru yang muncul. Begitu juga mengenai keamanan mulai dari keamanan tradisional dan non-tradisional yang kian bertransformasi diikuti dengan konsep *human security* (HS). Perspektif *human security* mengisi celah yang tidak dapat dijelaskan oleh keamanan tradisional. Terdapat nilai “*universalism of life claim*” yang menjadi ciri khas dari perspektif *human security* yang diusung oleh UNDP.

Pada dasarnya, *human security* merupakan bagian dari konsep keamanan yang terus terdefinisi. Konsep keamanan yang pada awalnya dari sudut pandang realisme telah bergeser sejak 1990-an setelah Perang Dingin. Perkembangan tersebut yang akhirnya memunculkan interpretasi baru mengenai konsep keamanan. Prioritas keamanan yang pada awalnya terpusat pada negara (*state centred*) menjadi berkembang ke keamanan yang berfokus pada manusia (*people centred*), sehingga melalui upaya ini, konsep keamanan bisa melingkupi isu-isu *low politics* yang lebih

TENTANG PENULIS

Abubakar Eby Hara adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Saat ini, ia adalah peneliti di Centre for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH), Universitas Jember. Ia memperoleh gelar master dan doktornya di The Research School, Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University (ANU), Australia. Ia juga pernah menjadi peneliti tamu di berbagai lembaga dan universitas, seperti The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapura), Center of Southeast Asian Studies (CSEAS) - Kyoto University (Jepang), East-West Center (Amerika Serikat), Center for Southeast Asian Studies - National Sun Yet-Sen University, dan Sydney Southeast Asia Centre, Sydney University (Australia). Minat penelitiannya adalah di bidang kerja sama ASEAN, kebijakan luar negeri Indonesia, serta demokrasi di Asia Tenggara. Ia telah menerbitkan artikel di beberapa jurnal, seperti *Japanese Journal of Political Science*, dan *Contemporary Southeast Asia*.

Agus Trihartono adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Ritsumeikan Global Innovation Research Organization (R-GIRO), Ritsumeikan University, Jepang, dan Institute of International Relations (IIRAS), Jepang. Saat ini, ia merupakan salah satu peneliti di Centre for Research in Social